

## **JEJAK PENERAPAN EKONOMI AKUNTANSI PADA PEMERINTAHAN KERAJAAN MATARAM KUNO HINGGA MATARAM ISLAM ABAD XX M**

**Nisfatul Izzah<sup>1\*</sup>, Marwah Padma Raya Hasibuan<sup>2</sup>, Siti Nurhaliza<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Mataram

\*Correspondences: Nisfatulizzah@gmail.com

**Abstrak:** Tujuan Utama – Penelitian ini untuk mengetahui penerapan historiografi akuntansi budaya Mataram Kuno hingga Mataram Islam. Metode –Menggunakan beberapa metode, yang meliputi; artikel review, sumber arsip historis, epigrafi dan sosial arkeologi. Sumber diperoleh dari; Jurnal Ilmiah, perpustakaan daerah, Museum, keraton, serta sejarawan. Temuan Utama – Penelitian ini menemukan bahwa terdapat penerapan akuntansi sejak masa Mataram Kuno hingga masa awal Mataram Islam yang masih bisa dirasakan manfaatnya sampai saat ini. Setidaknya akuntansi dapat dilihat dari; penggunaan mata pencaharian bidang ekonomi, transaksi pasar, perpajakan dan otonomi daerah. Implikasi Teori dan Kebijakan – Penelitian ini menawarkan pengetahuan sejarah penerapan akuntansi pada masa lalu yang tidak ada pada akuntansi modern. Penelitian ini juga menjadikan sejarah yang tidak boleh dilupakan bagi mahasiswa di lingkungan Yogyakarta saat ini. Kebaruan Penelitian – Penelitian ini menjelaskan tiga masa, yaitu masa Mataram Kuno, Mataram Islam, dan Kesultanan Yogyakarta dalam satu judul sedangkan penelien sebelumnya kebanyakan dipisah berdasarkan masa.

**Kata kunci;** Akuntansi Budaya; Riwayat Akuntansi; Akuntansi Mataram; Akuntansi Jawa; Kerajaan Mataram Kuno;

**Abstract:** *Main Purpose - This research is to determine the application of accounting historiography from Ancient Mataram to Islamic Mataram culture. Method - This research employed several methods, including review articles, historical archival sources, epigraphy, and social archaeology. Sources were obtained from scientific journals, regional libraries, museums, palaces, and historians. Main Findings - This research found that accounting practices existed from the Ancient Mataram period to the early Islamic Mataram period, and their benefits are still evident today. Accounting can be seen in its use in economic livelihoods, market transactions, taxation, and regional autonomy. Theory and Practical Implications - This research offers historical insights into the application of accounting in the past, a topic lacking in modern accounting. It also provides a memorable history for students in Yogyakarta today. Novelty - This research explains three periods, namely the Ancient Mataram period, Islamic Mataram, and the Yogyakarta Sultanate in one title, whereas previous research was mostly separated based on the period.*

**Keywords:** *Cultural Accounting; Accounting History; Mataram Accounting; Javanese Accounting; Ancient Mataram Kingdom;*

### **Article History:**

*Received 18-02-2025; Revised 20-03-2025; Accepted 26-04-2025*

## **PENDAHULUAN**

Menembus benteng tradisi jauh ke belakang setelah penelitian akuntansi modern berkembang di Indonesia, seperti: akuntansi masa revolusi Inggris, hingga akuntansi masa colonial Belanda (Sukoharsono & Gaffikin, 1993; Sukoharsono & Gaffikin, 1993; Sukoharsono, 1995; Bastian, 2006), justru peneliti Indonesia akhir-akhir ini tidak kalah kreatif dan unik untuk pengembangan fenomena penelitian akuntansi berbasis budaya Indonesia dan khususnya Kerajaan Nusantara. Beberapa peneliti Indonesia juga menarik jauh ke belakang menjadikan kerajaan Indonesia sebagai objek penelitian. Kerajaan merupakan penciri dari asal usul negara kesatuan Republika Indonesia masa lampau yang dikenal dengan nama Nusantara yang bercorakkan kerajaan tersebar hampir di seluruh penjuru Negeri.

Maka, sangat menarik apabila saat ini penelitian tentang sejarah akuntansi budaya di kerajaan-kerajaan Indonesia dilakukan untuk mengetahui sejarah akuntansi yang pernah ada.

Embrio penelitian sejarah akuntansi budaya Kerajaan Indonesia telah dilakukan oleh (Sukoharsono, E.G dan Lutfillah, 2008) yang mengambil latar Kerajaan Singosari sebagai titik awal objek penelitian. Penelitian berikutnya tentang akuntansi Kerajaan Bali Kuno yang secara berturut-turut dilakukan oleh (Budiasih & Sukoharsono, 2012) tentang penerapan akuntansi dan uang pada masa Bali Kuno, Budiasih, (2014) juga meneliti penerapan fenomena akuntabilitas perpajakan pada jaman Bali Kuno abad IX-XV Masehi, serta terakhir Budiasih, (2016) meneliti praktik akuntansi sosial dan lingkungan masa Bali kuno tahun 1-1500 M. Selain dua peneliti perioner tersebut, fokus penelitian akuntansi sejarah kerajaan Indonesia juga mulai terus berkembang dan terus merambah ke berbagai kerajaan lainnya, seperti pada penelitian akuntansi di kerajaan Gajah Mada oleh (Rosyindia, 2014), dan Kerajaan Majapahit oleh (Lutfillah et al., 2015).

Berdasarkan hasil literature dapat disimpulkan bahwa alur penelitian-penelitian sejarah budaya akuntansi Indonesia mulai dilakukan sejak dari tahun 1993 hingga 2019. Runtutan penelitian tersebut di atas dapat diperkuat dengan mengkaji penelitian yang dilakukan (Nawang Sari & Hanun, 2020), yaitu pemetaan penelitian sejarah akuntansi Indonesia dengan pendekatan New Accounting History (NAH). Untuk memperoleh lebih banyak literatur periset tidak cukup berhenti sampai tahun 2019 saja, melainkan terus melakukan penelitian dan diketahui penelitian akuntansi pada Kerajaan Gorontalo yang dilakukan oleh (Amaliah & Monoarfa, 2020).

Khusus penelitian dengan latar kerajaan Mataram Jawa sebagai objek penelitian ini dibagi menjadi dua masa, yaitu; masa Hindu-Buddha yang disebut dengan (Mataram Kuno) atau (Mataram I) dan masa Islam yang disebut dengan (Mataram Islam) atau (Mataram II). Penelitian sejarah penerapan akuntansi masa Mataram Kuno telah dilakukan oleh (Lutfillah & Sukoharsono, 2013) dan Candi Borobudur sebagai pusat penelitian sejarah perkembangan akuntansi masa Dinasti Syailendra Abad VIII oleh (Widhianningrum, 2019). Serta, penelitian tentang kehidupan Ekonomi Masyarakat Mataram Kuno oleh (Arrazaq & Rochmat, 2020). Sedangkan, penelitian tentang sejarah penerapan akuntansi masa Mataram Islam dapat dilihat pada penerapan pajak Kerajaan Mataram Islam oleh (Munawar, 2020) dan tentang setatus wilayah bebas pajak di Mataram Islam oleh (Gunawan et al., 2022). Namun, dua penelitian tentang pajak pada masa Kerajaan Mataram Islam dilakukan dalam bidang sejarah, budaya, dan sosial lainnya, sehingga hasil penelitian cenderung mengungkapkan sejarah budayanya dari pada penerapan akuntansinya.

Jika, penelitian akuntansi budaya mataram terdahulu terpisah-pisah antara masa Mataram Kuno dan masa Mataram Islam, maka tujuan penelitian ini meliputi dua zaman, yaitu akuntansi Mataram Kuno dan Mataram Islam. Otomatis rentang waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini lebih panjang dibandingkan penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga tidak hanya melihat dari sisi penerapan pajak saja sebagaimana kebanyakan peneliti sebelumnya, tetapi penelitian ini meliputi transaksi pasar, produksi dan distribusi, pengukuran nilai akuntansi, serta daerah otonom dan pajak, selain itu kebaruan (novelty) dari penelitian ini adalah tempat penelitian dilakukan di daerah aseli Yogyakarta yang merupakan salah satu wilayah terpenting Kerajaan Mataram Jawa meliputi museum dan keraton Yogyakarta, serta dua informan yang merupakan sumber ahli Yogyakarta diantaranya dosen budaya Mataram dan cicit keturunan Kerajaan Mataram Islam. Keterbaruan ini diharapkan dapat memunculkan informasi dan kemungkinan adanya temuan baru yang belum pernah ada pada penelitian sebelumnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan *Historical Research* untuk mengkaji secara kritis kejadian di masa lalu, supaya dapat menilik bukti dan riwayat sejarah baik dari informan maupun pada benda dan tulisan sejarah masa lalu (Denzin & Lincoln, 2018). Penelitian ini menggunakan sumber arsip historis epigrafi dan sosial arkeologi baik yang diperoleh peneliti sendiri maupun hasil studi literature (*literature study*). Sosial arkeologi dalam penelitian akuntansi sejarah (Lutfillah & Sukoharsono, 2013) dijelaskan sebagai metode yang didasarkan pada temuan sumber sejarah masa lalu dan relevansinya disesuaikan dengan fenomena sosial di mana akuntansi tersebut dipraktikkan, yaitu praktik perpajakan pada masa kerajaan Mataram Kuno. Sementara itu historis dengan pendekatan epigrafi menurut (Kuntowijoyo, 2013) terdiri atas lima tahapan yaitu, 1) pemilihan topik, 2) pengumpulan sumber, 3) verifikasi (kritik sumber), 4) interpretasi (analisis dan sintesis), 5) historiografi (penulisan sejarah). Pendekatan epigrafi digunakan karena menggunakan data

prasasti yang telah dialih aksara dan dialih bahasakan oleh peneliti terdahulu. Salah satu peneliti yang telah menggunakan metode ini untuk penelitian sejarah perekonomian dan perdagangan adalah (Arrazaq & Rochmat, 2020). Adapun epigrafi menurut (Kuntowijoyo, 2013), yaitu pengetahuan mengenai cara membaca, menentukan waktu atau penanggalan, dan menganalisis inskripsi kuno yang terdapat pada prasasti sebagai informasi, atau catatan penting pada kejadian tertentu.

Penelitian ini juga menggunakan studi literature untuk memperkaya wawasan dan memperkuat referensi dalam kajian teori. Menurut Sarwono, (2006) sumber studi literature atau juga dikenal dengan studi kepustakaan dapat digunakan untuk pengkajian data dari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian untuk mendapatkan landasan teori dari masalah yang akan diteliti.

Sumber-sumber penelitian ini didapat dari dua data: Ke (1) data primer, yaitu melalui informan Sejarahwan, Keraton Yogyakarta dan Museum Sonobudoyo yang merupakan tempat umum untuk menemukan data primer sejarah. Ke (2) data sekunder yang tersedia di artikel jurnal yang terpublikasi, serta buku dan catatan di perpustakaan daerah Yogyakarta. Guna menelaah beberapa sumber data sejarah (Kuntowijoyo, 2013) membagi sumber data menurut bahannya yaitu: tertulis dan tidak tertulis, atau dokumen dan artefak. Sumber tertulis dapat berbentuk semua dokumen tertulis yang memuat ungkapan pikiran, perasaan, aturan-aturan sebagai hasil karya masa lampau yang terdiri dari prasasti dan naskah (karya) sastra atau berita asing, sedangkan Sumber tidak tertulis (artefak) dapat berupa foto-foto, bangunan atau alat-alat.

Sementara itu (Lutfillah & Sukoharsono, 2013) mengutip Sjamsuddin (2007) menyebutkan kriteria cara menghindari sumber palsu melalui kritik eksternal dan internal yang terdiri dari empat kategori, yaitu : 1) Kriteria fisik, 2) garis asal usul dari dokumen atau sumber, 3) tulisan tangan, dan 4) isi dari sumber. Hal ini dilakukan sebagai jaminan bahwa sumber-sumber sejarah yang masuk ke dalam perpustakaan dan arsip negara teruji keasliannya. Dengan demikian pengumpulan materi penelitian ini dapat dikatakan telah melalui sumber teruji, yaitu dari studi literature publikasi artikel ilmiah yang terdapat pada jurnal yang telah direview para ahli dan sumber dari perpustakaan serta museum Sonobudoyo Yogyakarta yang otentitasnya dapat dipergunakan karena telah melalui kritik eksternal dan internal museum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerajaan Mataram Jawa **pertama** merupakan Kerajaan Mataram Kuno yang disebut juga dengan Kerajaan Mataram Hindu (Mataram I) yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke XIII Masehi (M). Nama Mataram muncul pertama kalinya pada masa pemerintahan Raja Sanjaya yang memerintah sejak tahun 717 M atau antara abad ke VII-VIII M dan karena pada masa kepemimpinannya agama resmi kerajaan adalah Hindu aliran Siwa. Ketika Raja Syailendrawangsa berkuasa, agama resmi kerajaan berganti menjadi pengikut dan pelindung Buddha aliran Mahayana pada pertengahan abad ke-XIII M. Pada masa kekuasaannya mengalami masa kejayaan. Adapun keberadaan kerajaan di Jawa Tengah ini sampai pada masa Raja Rakai Sumba/Pankaja Dyah Wawa pada abad ke IX M.

Kemudian abad ke X M kerajaan Mataram Kuno mengalami musibah meletusnya Gunung Merapi dan perebutan kekuasaan, serta potensi adanya ancaman serangan dari Kerajaan Sriwijaya, sehingga pindah ke Jawa Timur yang kemudian penyebutannya lazim dengan istilah Kerajaan Medang Kamulan, meskipun nama Medang sudah ditemukan sejak periode Jawa Tengah sebagaimana pada prasasti Minto dan prasasti Anjuklandang yang ditemukan di Bhumi Mataram (nama lama untuk penyebutan Yogyakarta dan sekitarnya). Istilah Mataram kemudian lazim dipakai untuk menyebut nama kerajaan secara keseluruhan, meskipun tidak selamanya berpusat di sana (El-Ibrahim dan Noor, 2020). Adapun Kerajaan Medang di Jawa Timur dipimpin oleh Raja Sindok sampai dengan Raja Sri Lokeswara Dharmmawansa Airlanga Anantawikramottungadewa (1019-49 M) dan runtuh pada awal abad ke-XI M.

Raja Mataram Kuno merupakan pemimpin tertinggi dan raja pertama yang memakai gelar “Ratu” (pada jaman itu Ratu belum identik dengan kaum perempuan). Gelar Ratu dihapuskan pada masa Syailendra dan diganti dengan “Sri Maharaja”. Selain meninggalkan bukti sejarah berupa prasasti yang tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Timur, kerajaan Mataram Kuno juga membangun banyak candi bercorakkan Hindu maupun Buddha. Penduduk Mataram sejak periode Bhumi Mataram (Mataram Kuno) sampai periode Wathan (kalender Jawa) Mataram Islam umumnya bekerja sebagai petani yang terkenal dengan negara agraris.

Beberapa candi dan prasasti, seperti Candi Borobudur, Prambanan, dan Candi peninggalan peradaban masa lalu lainnya, seperti Candi Sewu, Mendut, Pawon, Kalasan, Sari dan Arjuna, serta Candi Dieng yang ditemukan dikemudian hari melukiskan banyak peradaban masa lalu termasuk aktivitas masyarakat Mataram Kuno dalam mata pencaharian bidang ekonomi. Berdasarkan hasil literature menunjukkan bahwa (Arrazaq & Rochmat, 2020) para pelaku ekonomi dapat diketahui dari relief Candi Borobudur adalah para pedagang, petugas pemungut pajak, pekerja seni, pengrajin, petani, pekebun, serta peternak. Adapun aktivitas ekonomi meliputi tiga macam kegiatan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi.

Sementara itu (Nastiti, 2003) menyebutkan bahwa kegiatan ekonomi dapat dilihat pada peran pasar yang meliputi komponen-komponen sistem pasar masa Mataram Kuno, yaitu rotasi, produksi, distribusi, transportasi, dan transaksi. Masing-masing komponen memiliki ketergantungan satu sama lain, misalnya faktor produksi tergantung pada faktor distribusi, dan kelancaran distribusi sangat tergantung dengan alat transportasi yang baik, sehingga hasil produksi dapat mencapai pasar.

Adapun lokasi pergantian penempatan pasar pada masyarakat Jawa Kuno dikenal karena adanya sistem pembagian daerah yang disebut dengan istilah “*mancapat*” (empat) dan “*Mancalima*” (lima), yaitu desa induk yang dikelilingi oleh empat desa yang terletak di arah empat penjuru mata angin. Penerapan konsep ini mengatur “**rotasi**” hari-hari pasar pada desa-desa tertentu. Hari-hari pasar terdiri dari lima hari (*pancawara*) dalam satu rotasi atau “sepasar”, yaitu Umanis/Manis, Pahing, Pon/Pwan, Wagai/Wage, dan Kaliwuan atau masa kini dikenal dengan hari; Manis/legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Konsep *Pancawara* itulah sebagai sistem dan rotasi mengatur hari-hari pasar pada desa-desa tertentu, misal hari Kaliwuan diadakan di pasar Induk, Wagai di sebelah Utara dan seterusnya. Adapun untuk pasar yang buka setiap hari hanya dilakukan dalam rentang waktu yang sebentar mulai pukul 06.00 sampai pukul 10.00 pagi yang dikenal dengan istilah pasar “*krempyeng*”.

Lebih lanjut hasil literature (Nastiti, 2003) menyebutkan bahwa Masyarakat Jawa Kuno juga telah memiliki banyak “**komoditi**”, hanya saja tidak semua komoditi bisa disebutkan karena keterbatasan penulisan, tetapi ada beberapa komoditi yang dapat dikelompokkan kedalam dua garis besar, yaitu kelompok komoditi yang berasal dari pantai, seperti; barang impor oleh perahu-perahu dagang maupun hasil kerajinan masyarakat lokal dan kelompok komoditi yang berasal dari pedalaman, seperti; hasil agraris yang berupa beras, sayuran, palawijo, dan lainnya.

Komoditi yang diperdagangkan dapat dibedakan oleh “**produksinya**”, yaitu produksi primer dan produksi sekunder. Bidang primer, seperti pertanian, peternakan, dan perikanan, sedangkan bidang sekunder meliputi industri kecil yang diusahakan para perajin (*misra*) baik dalam bentuk logam maupun non logam. Aktivitas produksi dalam bentuk komoditas padi sebagai hasil pertanian dan proses distribusi barang dagangan dapat diketahui dari salah satu relief Karmawibhangga di Candi Borobudur sebagaimana gambar relief Karmawibhangga O.65 dan O.43:



**Gambar 1: Relief Karmawibhangga dengan kode O.65.**

Sumber: Arsip Balai Konservasi Borobudur.

Berdasarkan gambar relief Karmawibhangga kode O.65 menggambarkan sebuah aktivitas “**produksi**” padi dan beras yang merupakan salah satu komoditas perdagangan hasil bumi dalam masyarakat Kerajaan Mataram Kuno. Padi diilustrasikan berada di ladang terdiri atas berbagai biji-bijian yang sedang dimakan oleh banyak hama tikus. Terdapat bangunan lumbung yang diawasi dua orang dan anjing penjaga. Lumbung digunakan untuk menyimpan hasil panen supaya dapat mengatur kebutuhan pangan dan menyimpan surplus hasil panen.

Selain menyimpan hasil panen, berdasarkan hasil dokumentasi di Museum Sonobudoyo dapat diketahui bahwa masyarakat Mataram Kuno juga telah mengenal sistem “**menabung**”, yaitu sebuah cara menyimpan atau menyetor sebagian pendapatan uang dengan menggunakan wadah penyimpanan khusus uang berbahan tanah liat yang dibakar. Tempat penyimpanan ini dikemudian hari pada masa Kerajaan Majapahit (Abad ke XIII-XVI M) disebut dengan “celengan”. Penyebutan celengan, karena bentuk yang digunakan saat itu kebanyakan bentuk manusia atau hewan, seperti hewan celeng dalam mitologi China atau disebut babi dalam bahasa Jawa yang merupakan binatang dalam kepercayaan Hindu-Buddha diyakini sebagai Dewa Kuwera yang merupakan dewa kekayaan atau kemakmuran (Radar Mojokerto.Jawa Pos.com, 2023). Berikut ini Celengan berbentuk kepala manusia yang periset temukan di Museum Sonobudoyo:



**Gambar 2: Celengan Bentuk Kepala Manusia dari Tanah Liat**  
Sumber: Arsip Museum Sonobudoyo Yogyakarta

Adapun relief yang menggambarkan cara “**distribusi**” barang dagangan pada masyarakat Kerajaan Mataram Kuno dengan cara memikul bagi pedagang laki-laki atau digendong dengan bakul jika pedagang perempuan yang merupakan cara untuk menjajakan dagangan mereka kala itu, sebagaimana pada gambar relief kode O.43. dan diperkuat dengan lukisan gambar 4 berikut ini:



**Gambar 3: Relief Karmawibhanga dengan kode O.43.**  
Sumber: Arsip Balai Konservasi Borobudur

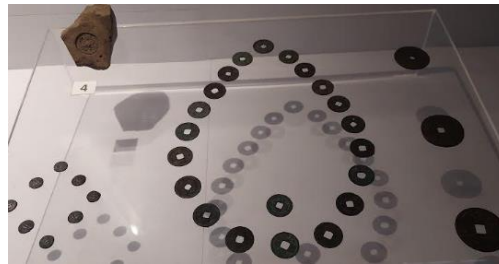


**Gambar 4: Lukisan Aktivitas Berdagang dengan Pikulan**  
Sumber: Arsip Museum Sonobudoyo Yogyakarta

Sementara itu “**transportasi**” dalam bidang ekonomi digunakan untuk mengangkut masalah produksi, pertukaran, distribusi, dan konsumsi, bahkan mengangkut orang yang dihubungkan dengan jembatan antar desa untuk jalur darat dan menggunakan perahu yang menghubungkan kedua tepi sungai. Sedangkan “**transaksi**” dalam masyarakat Jawa Kuno bisa dilihat dalam dua bentuk, yaitu pertama, dalam bentuk “barter” yang didasarkan atas perbandingan satuan atau pertukaran barang yang

telah ditetapkan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Kedua, transaksi dalam bentuk uang, baik dalam bentuk potongan logam, emas (*kati*, *suwarna*, *masa*, dan *kupan*), maupun perak (*dharana*) sebagai alat tukar/pembayaran. Satu *kati* sama dengan 20 *dharana*. Adapun masa satuan uang perak adalah “Masa” atau sering disingkat dengan “MA”.

Selama ini, transaksi yang banyak disebutkan dalam prasasti adalah transaksi jual beli atau gadaai tanah yang menggunakan perak dan emas, yang berarti transaksi memiliki nilai tinggi. Kemungkinan transaksi kebutuhan sehari-hari dengan nilai rendah menggunakan mata uang logam Cina yang masa Majapahit disebut dengan “*pisipis*”. Berikut ini dokumentasi koin dan cetakan mata uang cina (kepeng cina) yang memiliki bentuk khas, yaitu bulat pipih dengan lubang persegi ditengahnya.



**Gambar 5: Cetakan Uang dari Batu dan Uang Koin Cina**

Sumber: Arsip Museum Sonobudoyo Yogyakarta

Logam selain untuk mata uang juga digunakan sebagai alat **ukur** (*matric*). Masyarakat Jawa Kuno telah mengenal dan memiliki pengetahuan tentang ukuran yang detil. Melalui prasasti dan juga artefak menunjukkan adanya ukuran berat logam mulia yang diselaraskan dengan mata uang emas, perak, dan besi, seperti; *Kati*, *Tahil*, *Masa*, dan *Kupang* sebagai ukuran satuan gram seperti emas atau perak dengan menggunakan timbangan ukuran kecil, seperti dokumentasi gambar 6 berikut ini:



**Gambar 6: Miniatur Relief Timbangan dan Timbangan Logam**

Sumber: Arsip Museum Sonobudoyo Yogyakarta

Kegiatan pasar selain menjadi sumber ekonomi masyarakat juga melahirkan sistem ekonomi yang menjadi sumber penghasilan Kerajaan Mataram Kuno dengan segala peraturannya, yaitu dalam bentuk “**pemungutan pajak**”. Dari data prasasti disimpulkan bahwa sumber penghasilan kerajaan; pajak (*drawya haji*), pajak perdagangan dan kerajinan. Juga kerja bakti (*buat haji*), denda atas tindak pidana (*sukha dukkha*) sebagaimana hasil naskah yang termuat dalam buku (Nastiti, 2003). Meningkatnya keramaian pasar menjadikan kerajaan memanfaatkan dan mengatur pertumbuhan kekayaan daerah pelabuhan dengan mendirikan *sima*, yaitu wilayah yang bebas pajak (Widhianningrum, 2019).



**Gambar 7: Relief Karmawibhanga Ilustrasi Keramaian Pasar Tradisional**

Sumber: Arsip Balai Konservasi Borobudur (Widhianningrum, 2019)

Klausul-klausul *sîma* mengatur jumlah pedagang atau pengrajin yang bebas pajak dan mengatur volume perdagangan atau produksi yang tidak dikenakan pajak. Misalnya, jika jumlah barang dagangan lebih dari yang ditentukan maka sisanya itu dikenai pajak. Aturan penetapan *sîma* dan pasaran dapat dilihat pada prasasti “Penggumulan” A dan B, yang merupakan sumber sejarah informasi struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Mataram Kuno lebih tepatnya masa pemerintahan raja Balitung (Balitung) tahun 824 saka (902 M) atau awal abad ke X M.



**Gambar 8: Prasasti Penggumulan” A dan B”**

Sumber: Arsip Museum Sonobudoyo Yogyakarta

Waktu pembayaran pajak adalah setiap habis panen atau setiap bulan Asuji (September-Oktober) dan bulan Kârtika (Oktober-November). Adapun pihak yang memungut pajak berasal dari rakyat adalah seorang *Rama*, yaitu pejabat atau tokoh masyarakat tingkat desa yang bertugas mengumpulkan dan mengelola *drawya haji* (pajak) dari rakyat sebagai penguasa *wanua* (desa). Kemudian diteruskan melalui pejabat-pejabat perantara, yaitu *nayaka* dan *pratyaya* untuk diteruskan ke wilayah *watek* yang dikuasai oleh *rakryan* dan *sangat* atau salah satu dari keduanya. Selanjutnya dari intek pajak diteruskan ke tingkat kerajaan.

Luas dan macam tanah yang ada di seluruh wilayah kerajaan, dan jumlah penghasilan pajak yang dapat diterima terdaftar di catatan pemerintah. Adapun hasil pemungutan pajak semula diperuntukkan bagi kepentingan kerajaan dan kemudian hari diperuntukkan bagi keperluan *sîma* yang mendapatkan penghasilan dari desanya. Pada praktiknya pemungutan pajak tidak serta merta berjalan lancar, kasus penyalahgunaan atau penyelewengan pajak oleh petugas pemungut pajak yang tidak jujur sudah mulai terjadi di masa ini, seperti memanipulasikan ukuran tanah dan tidak menjalankan tugas yang semestinya (Lutfillah & Sukoharsono, 2013).

Berdasarkan hasil literature (Maziyah, 2010) Daerah yang bebas pajak dan mengatur keuangan daerah secara mandiri atau saat ini dikenal dengan istilah daerah otonom sudah ada sejak sekitar abad VIII M di Jawa Tengah. Berdasarkan data prasasti (Schrieke, 1975; Machi Suhadi, 1981), daerah otonom sebagai daerah *sîma* atau daerah *swatantra*, atau pada masa yang lebih muda lagi sering disebut sebagai daerah “perdikan”. Perdikan merupakan daerah yang bebas dari beban-beban pemungutan pajak dan tidak didatangi oleh penguasa (raja) dan berhak mengatur sendiri hal-hal yang berkaitan dengan denda atas segala tindak pidana, cukai perdagangan, dan memakai sebagian dari tradisi kerajaan, seperti menyantap makanan khusus pada waktu pesta, juga diperkenankan corak kain, payung

berwarna kuning, dan bentuk perabot seperti di istana bagi orang istimewa yang berjasa kepada raja. Meskipun *sîma* bebas pajak bukan berarti tidak memiliki kewajiban apapun. Daerah otonom tetap diuji kesetiiaannya oleh kerajaan dengan cara mewajibkan *sîma* memelihara bangunan suci beserta kegiatan didalamnya, seperti menyelenggarakan upacara keagamaan satu sampai dua kali dalam setahun, lengkap dengan persembahannya, serta loyalitas bekerja untuk kepentingan raja dan kepentingan bersama.

Runtuhnya Kerajaan Mataram Kuno menandai akhir cerita termasuk aktivitas akuntansinya dan hanya tinggal sejarah, namun bukti-bukti kebesarannya masih dapat disaksikan sampai sekarang. Hilangnya peradaban di Bhumi Mataram ke satu (I) memerlukan jeda waktu yang lama hingga kemudian hari baru muncul peradaban pada zaman Wathan **Mataram ke dua (II)**. Sejalan dengan hasil literatur dari (Susilo & Asmara, 2020) sampai saat ini periset belum mendapatkan data-data yang dapat menghubungkan antara Mataram Kuno dengan Mataram Islam. Adapun jeda waktu hingga, yaitu sekitar 700 hingga 800 tahun lamanya. Jika, Kerajaan Mataram Kuno (Mataram I) didirikan pada abad ke VIII M sampai awal Abad ke XI M yang bercorakkan Hindu-Buddha, maka Kerajaan Mataram II bercorakkan Islam didirikan pada abad ke XVI M.

Cikal bakal **Kerajaan Mataram Islam** berasal dari sayembara Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir, seorang Sultan Kerajaan Pajang yang berlokasi di daerah perbatasan antara Desa Pajang, Kota Surakarta, dan Desa Makamhaji, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo (Jawa Tengah) dengan janji hadiah tanah kekuasaan hutan rimbun (Mentaok) dalam rangka membunuh Arya Penangsang seorang adipati Jipang Panolan, sebuah kerajaan vassal dari Kesultanan Demak. Sayembara tersebut atas perintah Ipar dari Sultan Hadiwijaya, yaitu Ratu Kalinyamat Bupati Jepara yang sementara memegang kuasa Demak setelah suaminya Sultan Hadirin dan kakaknya yang seorang Raja Demak ke empat Sunan Prawoto wafat. Sebab keduanya wafat dibunuh oleh Arya Penangsang. Motif pembunuhan Arsa Penangsang terhadap keluarga dan keturunan penguasa Demak ke tiga (Pangeran Trenggono Ayah Ratu Kalinyamat) ditengarai karena balas dendam atas kematian ayah Arya Penangsang, yaitu Pangeran Seda Lapen yang lebih dulu telah dibunuh oleh Raden Prawoto kakak sulung dari Ratu Kalinyamat (Soedjipto, (2013); Peri, (2020)).

Singkat cerita sayembara itu dimenangkan oleh Danang Sutawijayah alias Panembahan Senopati, putra Ki Ageng Pemanahan pada tahun 1554 M. Meskipun begitu penyerahan hutan Mentaok baru diserahkan dua tahun kemudian pada 1556 M, yang diundur karena adanya ramalan salah satu Wali Songo dari Gersik Jawa Timur, yaitu Sunan Giri yang memprediksi bahwa; Wilayah Mataram akan menjadi kerajaan besar yang sangat berpengaruh di Jawa, sehingga Raja Pajang takut akan mendapatkan peberontakan. Namun, berkat jasa nasehat Sunan Kalijogo (Wali songo dari Yogyakarta) kedua belah pihak berjanji untuk tidak saling menyerang dan hidup berdampingan. Akhirnya pemenang sayembara mendapatkan haknya, yaitu; Panembahan Senopati mendapatkan tanah Pati, sebuah kadipaten di pesisir utara yang sudah maju. Sedangkan ayahnya Pemanahan mendapatkan tanah Mataram yang masih berupa hutan “Mentaok” (bahasa Jawa: Alas Mentaok). Mentaok merupakan nama salah satu jenis pohon yang ditemukan di wilayah hutan mentaok tersebut. Hutan ini dulunya ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya di daerah Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta.

Sutawijaya atau Panembahan Senopati, awalnya menjabat sebagai Adipati Mataram di bawah Kerajaan Pajang. Setelah ayahnya Ki Ageng Pemanahan wafat (1578-1584 M), Sutawijaya kemudian menyatakan kemerdekaan dari Kerajaan Pajang dan mendirikan Kerajaan Mataram Islam pada tahun 1586 M (Abad ke XVI M).

Pada abad ke XVII M tepatnya tahun 1613-1645 M merupakan masa kejayaan Kerajaan Mataram Islam di bawah pemerintahan Sultan Agung yang terkenal. Pada masa ini mengalami perubahan gelar, mulai dari “Panembahan” menjadi “Susuhunan” atau “Sunan”, hingga “Sultan” atau lengkapnya “Sultan Agung Hanyakrakusumo Sayyidin Panatagama Senopati Ing Alaga Abdurrahman Khalifatullah”.

Pada pertengahan abad ke XVIII M (1755 M) Kerajaan Mataram Islam terpecah menjadi dua bagian, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (Kasultanan Yogyakarta) melalui perjanjian Giyanti. Setelah perpecahan tersebut raja pendiri Yogyakarta sekaligus sultan pertama Kasultanan Yogyakarta (1755-1792 M) secara terminologis mendapatkan gelar “Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Inggang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Khalifatullah Inggang Jumeneng Kaping.... (I/II/III, dan

seterusnya) Ing Ngayogyakarta Hadiningrat” (kutipan wawancara dengan Pramutomo) atau disingkat **Sri Sultan Hamengku Buwono (HB Ke I)** dan seterusnya sampai saat ini sudah turun temurun hingga HB Ke X.

Setiap Raja Mataram Islam memiliki masa kejayaannya dengan keunggulannya masing-masing, seperti, pada masa Sultan Agung kondisi sosial ekonomi didominasi pertanian faktor wilayah agraris. Namun, sektor perdagangan juga penting. Perdagangan skala kecil maupun skala besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, luar kota, dan manca negara, seperti ekspor-impor ke Cina, bahkan saat beras mengalami surplus juga ekspor beras dengan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) sebuah perusahaan dagang yang didirikan Belanda pada tahun 1602 M di Batavia (sekarang Jakarta) yang sekaligus wilayah Jawa satu-satunya yang belum bisa ditaklukkan Sultan Agung.

Guna memaksimalkan wilayahnya Sulan Agung menunjuk pejabat pengelola tanah Kutagara, Negara Agung, Mancanegara dan Pasisiran mulai pusat hingga daerah. Lingkaran konsentris wilayah kekuasaan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu tanah narawita, tanah perdikan dan tanah lungguh. Guna menjadikan padi sebagai komoditi utama pertanian Sultan Agung melakukan banyak gebrakan, seperti; membuat saluran air dan danau buatan, serta irigasi sawah. Selain itu juga melakukan penguatan sumber daya manusianya dengan cara penguatan kerja bersama petani, meningkatkan tenaga kerja melalui pemindahan penduduk, dan penerapan sistem pertanian terpadu antara tani dan ternak, yaitu memanfaatkan jerami padi kering untuk makan kerbau dimusim kemarau, serta adanya pembinaan para petani dalam bentuk forum komunikasi tani.

Lebih spesifik akuntansi pada masa Sultan Agung dapat dilihat dari pajak dan pengelolaan keuangan. Adanya penempatan para pejabat pengelola pajak juga menetapkan jenis besaran pajak. Adapun **jenis pajak** yaitu; pertama, pajak penduduk yang diserahkan ke keraton pada waktu upacara “Garebeg Mulud” memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW oleh para penguasa daerah, yaitu setiap tanggal 12 bulan Mulud dalam kelender Jawa. Kedua, pajak dalam bentuk hasil bumi dan tanah, serta *pasumbang* (sumbangan) atau *raja pundhut*. Keharusan memberikan pasumbang dikarenakan terdapat hubungan ikatan antara petani dan raja sebagai kawula-gusti, yaitu ikatan diantara hamba dan tuan yang saling menjaga setiap kepentingan. Sumbangan juga sebagai pengeluaran saat raja memiliki acara seperti; perkawinan, khitanan dan kematian. Alokasi pengeluaran kas kerajaan biasanya untuk membayar gaji pekerja keraton, pembangunan, peperangan, kebutuhan keraton. Ketiga, selain kepada rakyat biasa kerajaan juga menarik pajak *upeti* kepada para bupati. Keempat, kerajaan juga memungut beya dari orang-orang yang berkecimpung dalam perdagangan. Ukuran luas tanah yang dipergunakan untuk menentukan jumlah hasil bumi atau besarnya pajak ialah “*jung*”. Setiap *jung* terdiri dari 5 *bahu*. Munawar, (2020) menunjukkan hitungan pembagian *jung* sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel. 1: Prosentase Pembagian Padi sebagai Hasil Bumi berdasarkan Jung**

Daftar Penerima	Jumlah
Penduduk/Petani	40 %
<i>Bekel</i>	20%
<i>Demang/ngabehi</i>	8%
Bupati	8%
Keraton	24%

Sumber: (Munawar, 2020)

Adapun lembaga keuangan dan pembagian distribusi kekayaan kerajaan masa Sultan Agung juga sudah mulai terorganisir, meskipun belum beroperasi optimal yang hanya bertugas pengumpulan saja tidak melakukan mencatat pengeluaran, karena kerajaan masih dianggap sebagai tempat tertinggi mengatur semua kekayaan. Petugas yang mengatur keuangan disebut dengan “*wedana gedong kiwa*” dan “*wedana gedong tengen*” yang mengurus keuangan atau perbendaharaan kerajaan. Mereka terdiri dari; *pemaosan* (yang mengumpulkan pajak tanah), *meladang* (yang memungut hasil bumi berupa padi, palawija, dan yang lainnya), dan *ketandan* (yang mengurus pajak uang).

Sultan Agung Hanyokrokusumo selain piawai dalam urusan pemerintahan, juga piawai dalam melahirkan karya sastra, seperti serat Sastra Gending (Susilo & Asmara, 2020). Sejalan dengan Sultan Agung diketahui Sultan Yogyakarta HB ke II juga terkenal kemakmuran ekonominya yang ditandai dengan adanya kemajuan kesenian dan sastra. Menurut Pramutomo RM informan yang seorang

budayawan dan Office Associate di KRT.Wiroguno Center sekaligus cicit HB Ke VI dari jalur KRT Wiroguno seniman Keraton Yogyakarta pencipta Gendhing Prabu Mataram (cucu HB ke VI), ia menuturkan bahwa sejalan dengan pemikiran (Riclefs, 1998) “

*“tingkat kesejahteraan ekonomi sebanding lurus dengan tingkat kesejahteraan seni”. Pada masa ini sastra dengan filosofinya yang adiluhung dibayar mahal “Dulu jaman kejayaan Mataram Islam, karya sastra dibayar tinggi, semakin makmur ekonomi kerajaan semakin nampak pertumbuhan seni budaya Yogyakarta, karena ekonominya sudah mapan”*

Sementara itu (Moertono, 1985) tanpa membedakan secara khusus masa kepemimpinan raja tertentu ia menyebutkan bahwa pemerolehan dan pembagian kekayaan Masa Mataram II Abad XVI-XIX M setidaknya terangkum dalam tiga hal, yaitu; pertama, perpajakan dan sistem pengerahan tenaga, mengikuti sifat garis organisasi pemerintahan, boleh dikatakan sederhana dan dapat disebut pembiayaan *ad hoc* atau *contingent* (sementara). Kedua, Sumber kekayaan negara yang terpenting adalah perdagangan dan perniagaan, tetapi setelah perdagangan macet akibat perang dagang dengan Belanda, maka petanilah yang harus menggantikannya. Ketiga, pengerahan tenaga rakyat merupakan faktor ekonomi yang terpenting untuk kelancaran hidup negara.

Adapun beberapa peninggalan bukti transaksi ekonomi pertengahan era Mataram Islam bisa periset tampilkan berdasarkan dokumentasi Museum Sonobudoyo, seperti gambar mata uang pertama berupa koin logam yang dicetak VOC pada tahun 1726 M dan mata uang kertas gambar wayang dikeluarkan oleh De Javasche Bank yang konon dibuat untuk mengambil hati rakyat bumi putera yang menilai wayang sebagai budaya adiluhung meskipun akhirnya menjadi seri gambar uang terakhir sebelum kekuasaan beralih ke Jepang tahun 1942 M.



**Gambar 9: Uang Logam dan Uang Kertas VOC**  
Sumber: Arsip Museum Sonobudoyo Yogyakarta

Selain itu observasi pada benda-benda peninggalan tentang cerita pasar yang ada di Musium Sonobudoyo menunjukkan adanya fungsi pasar sebagai tempat multikultural yang mempertemukan berbagai etnis dan budaya Jawa, Tionghoa, Saudagar Arab, serta India. Pasar juga menjadi ruang informasi tersiarkannya berita, serta harmoni budaya dan kepercayaan seperti; tarian keliling, alunan musik pengamen, hingga atraksi sulap pedagang obat untuk menarik simpani calon konsumen.

Dibalik gemuruh transaksi pasar, ada dunia spiritual yang mengalir pelan. Ritual magis, jimat penglaris, atau mantra untuk keselamatan menjadi saksi bisu upaya manusia meraih berkah dan perlindungan dari yang tak kasat mata. Bagi pedagang, praktik ini bukan hanya warisan leluhur, melainkan do'a yang diwujudkan dalam benda dan gerak sebuah dialog antara harapan dan realitas.

Pada era yang lebih modern, yaitu abad ke XX M lebih tepatnya pada era Mataram Ngayogyakarta, yaitu pada masa HB IX berdasarkan hasil literatue (Kismoyo, 2022) juga konfirmasi wawancara langsung dengan penulis buku tersebut Heru Kismoyo seorang budayawan dan dosen Mataram menyebutkan bahwa:

*“Akuntabilitas trickle down effect HB IX, yaitu ekonomi kerakyatan sebagai rembesan ke bawah dari kelompok orang kaya kepada masyarakat kecil, yang mana kebijakan ini mampu untuk: (a) melindungi rakyat dari kerja paksa Romusa dengan membangun Selokan Mataram,*

yaitu masyarakat yang telah bekerja membuat selokan tidak lagi kerja paksa Romusa, (b) Membangun pabrik gula Madukismo untuk menampung petani tebu, (c) Mendukung ekonomi rakyat dalam jual beli dari hasil pertanian, kerajinan perikanan, peternakan, industri, batik lurik dengan cara membangun pasar Beringharjo, (d) Mendirikan kampus yang diberinama Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta dari bangunan bersejarah di Ndalem Mankubumen barat pasar Ngasem/ Taman Sari”.

## SIMPULAN

Penelitian ini menemukan adanya sejarah akuntansi Mataram Jawa yang terdiri dari dua era, yaitu Mataram Kuno bercorakkan Hindu-Budha dan Wathan Mataram bercorakkan Islam yang terbagi menjadi dua era, yaitu era awal pendirian Mataram Islam dan era pasca perjanjian Giyanti yang memecah menjadi dua bagian; Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (Kasultanan Yogyakarta). Pada masa Mataram Kuno terdapat transaksi ekonomi dan akuntansi meskipun belum selengkap seperti akuntansi modern saat ini, diantaranya; transaksi pasar, mata pencaharian ekonomi (pertanian dan perdagangan). Seiring ramainya pasar mulai adanya penetapan *sima* (daerah bebas pajak dan wajib pajak) dalam otonomi daerah. Membutuhkan jeda waktu cukup lama sekitar 700-800 tahun baru terlahir peradaban baru yang bercorakkan Islam namun, Bhumi Mataram tetap selalu unggul dalam pertanian dengan beras sebagai komoditi utama lokal bahkan ekspor. Sultan Agung dan HB II dari Kesultanan Yogyakarta selain lihai dalam kepemimpinan juga lihai dalam seni budaya sastra yang menciptakan sastra *Gending*. Sastra pada masa ini memiliki nilai tinggi sejajar dengan kesejahteraan ekonomi. Pada era modern Abad ke XX M Kesultanan Yogyakarta dipimpin oleh HB IX yang memiliki gebrakan penting dalam bidang ekonomi akuntansi, seperti; membangun Selokan Mataram, Pabrik Gula Madukismo, Pasar Beringharjo, dan perguruan tinggi yang masih bisa dinikmati hingga kini.

Beberapa keterbaruan dari penelitian ini seperti benda-benda bersejarah (celengan dan papan kayu *sima*) pada Mataram Kuno, serta gambar uang logam dan uang kertas masa Mataram Islam yang tidak ada pada penelitin sebelumnya. Begitu pula dengan hasil wawancara dari budayawan, sehingga penelitian ini bisa menghadirkan akuntansi dilihat dari sudut pandang seni yang bernilai tinggi, serta pemikiran HB IX yang yang tidak pernah ada pada penelitian sejarah akuntansi budaya lainnya. Namun, penelitian ini ada keterbatasan, yaitu belum bisa membahas satu persatu capaian masing-masing raja, melainkan sebatas perwakilan masa awal pendirian, masa kejayaan, dan masa berakhirnya. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menjabarkan lebih khusus.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga LPPM UWM, Informan Pramutomo RM cicit dari HB Ke VI Yogyakarta dan H. Heru Wahyukismoyo pengajar filsafat budaya Mataram Kewidyamataram UWM, dan mahasiswa akuntansi UWM yang telah memberikan dukungan dan masukan berharga dalam penyelesaian artikel ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Amaliah, T. H., & Monoarfa, R. (2020). Accounting Practices During the Kingdom in Gorontalo ( XIV-XIX Century A . D .). *Palarch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(9), 2674–2687. <http://0-search.ebscohost.com.oasis.unisa.ac.za/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=147767384&site=ehost-live&scope=site>
- Arrazaq, N. R., & Rochmat, S. (2020). Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kerajaan Mataram Kuno Abad IX-X M: Kajian Berdasarkan Prasasti Dan Relief. *Patra Widya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah Dan Budaya.*, 21(2), 211–228. <https://doi.org/10.52829/pw.307>
- Bastian, I. (2006). *A Review of The Accounting Role in Ancient and Colonial Period: a Case Study of Indonesian Telecommunication Industry*. 3(1). <https://doi.org/10.21002/jaki.2006.01>
- Budiasih, I. G. A. N. (2014). Fenomena Akuntabilitas Perpajakan Pada Jaman Bali Kuno: Suatu Studi Interpretif. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(3).

<https://doi.org/10.18202/jamal.2014.12.5030>

- Budiasih, I. G. A. N. (2016). Social and Environment Accounting Practices at the Time of the Ancient Bali. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219, 145–151. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.04.056>
- Budiasih, I. G. A. N., & Sukoharsono, E. G. (2012). Accounting practices and the use of money in the reign of king udayana in bali: An ethnoarcheological approach. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 15(3).
- Denzin & Lincoln, N. K. & Y. S. (2018). *Handbook of Qualitatives Research* (Fifth Edit). SAGE Publications, Inc.
- El-Ibrahim dan Noor, M. (2020). *Jelajah Kerajaan Nusantara II-Kerajaan Mataram Kuno* (Sulistiono (ed.)). PT. Bengawan Ilmu.
- Gunawan, H., Riset, P., Lingkungan, A., Anggie, M., Prasadana, F., Sultan, U., & Tirtayasa, A. (2022). *Status Wilayah Bebas Pajak Di Kerajaan Mataram Islam Abad VIII dan Kerajaan Siam Abad XX*. <https://doi.org/10.33652/handep.v6i1.212>
- Kismoyo, R. H. H. W. (2022). *Menggali Pemikiran Pendidikan Sri Sultan Hamengku Buwono IX "Membangun Paradigma Keilmuan Widya Mataram sebagai Universitas Peradaban Bangsa."* CV Andi Offiset.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Lutfillah, N. Q., & Sukoharsono, E. G. (2013). Historiografi Akuntansi Indonesia pada Masa Mataram Kuno (Abad VII-XI Masehi). *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(April). <https://doi.org/10.18202/jamal.2013.04.7183>
- Lutfillah, N. Q., Sukoharsono, E. G., Mulawarman, A. D., & Prihatiningtias, Y. W. (2015). The Existence of Accounting on Local Trade Activity in the Majapahit Kingdom (1293 AD -1478 AD). *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 783–789. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.168>
- Maziyah, S. (2010). *Daerah Otonom pada Masa Kerajaan Mataram Kuna : Tinjauan Berdasarkan Kedudukan*. 20(2).
- Moerton, S. (1985). *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Mala Lampau*. Yayasan Obor Indonesia.
- Munawar, Z. (2020). *Pengelolaan pajak di kerajaan mataram islam masa sultan agung, 1613-1645 m. 8311*, 10–23. <https://doi.org/10.30829/juspi.v4i1.7251>
- Nastiti, T. S. (2003). Pasar di Jawa pada masa Mataram kuna abad VIII-XI Masehi. In *Dunia Pustaka Jaya*.
- Nawangsari, A. T., & Hanun, N. R. (2020). Perkembangan Penelitian Sejarah Akuntansi di Indonesia dalam Bingkai Perspektif NAH. *Journal of Accounting Science*, 4(2), 57–69. <https://doi.org/10.21070/jas.v4i2.894>
- Peri, M. (2020). *Tuah Bumi Mataram* (Cetakan I). Araska.
- Radar Mojokerto.Jawa Pos.com. (2023). *Celengan Era Majapahit, Bukti Cemerlangnya Perekonomian Wilwatikta*. 21 Juli. <https://radarmojokerto.jawapos.com/sejarah-mojopedia/821810854/celengan-era-majapahit-bukti-cemerlangnya-perekonomian-wilwatikta?page=2>
- Riclefs, M. C. (1998). *The Seen and Unseen Worlds in Java, 1726-1749: History, Literature and Islam in the Count of Pakubuwana II*. Southeast Asia Publications Series.
- Rosyindia, C. D. (2014). Accounting and Accountability Strategies of Gajah Mada's Government: Analysis of Power – Knowledge. *IOSR Journal of Economics and Finance*, 5(6), 19–24. <https://doi.org/10.9790/5933-05611924>
- Sarwono, J. (2006). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*.

- Soedjipto, A. (2013). *Babat Tanah Jawi (Pertama)*. Laksana.
- Sukoharsono, E.G dan Lutfillah, N. Q. (2008). Accounting in the golden age of Singosari kingdom: A Foucauldian perspective. *Paper Presented at the Simposium Nasional Akuntansi XI, Pontianak*.
- Sukoharsono & Gaffikin. (1993). The genesis of accounting in indonesia: the dutch colonialism in the early 17th century. *The Indonesian Journal of Accounting and Business Society*, 1(1), 4–26.
- Sukoharsono, E. G. (1995). *Accounting , Colonial Capitalists , and Liberal Order* : 3(1).
- Sukoharsono, E. G., & Gaffikin, M. J. (1993). *Power and Knowledge in Accounting : Some Analysis and Thoughts on Social , Political , and Economic Forces in Accounting and Profession in Indonesia (1800-1950s)*.
- Susilo, A., & Asmara, Y. (2020). *Sultan Agung Hanyakrakusuma dan Eksistensi Kesultanan Mataram*. 20(2).
- Widhianningrum, P. (2019). Social accounting and ancient javanese society. *De Computis, Revista Española de Historia de La Contabilidad.*, 16(2), 143–159. <https://doi.org/10.26784/issn.1886-1881.v16i2.356>